



GOVERNUR KALIMANTAN UTARA

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR: 182.44/K.16/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA
BARANG DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TAHUN ANGGARAN 2019

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta pengelolaan keuangan daerah yang dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat;
- b. bahwa mereka yang nama atau jabatannya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kalimantan Utara tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kalimantan Utara Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 13);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019 yang selengkapnya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Dikuan KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - b. melaksanakan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - d. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - e. menandatangani SPM-LS dan SPM-TU;
 - f. mengawasi pelaksanaan anggaran unit kerja yang dipimpinnya;
 - g. meneliti kebenaran dan sahnyanya suatu tagihan sesuai ketentuan yang berlaku dan membubuhkan tanda tangan sebagai Contra Sign pada Cek yang dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran untuk mentunaikan uang di Bank;

- h. melaksanakan pengawasan/pemeriksaan atas pengelolaan uang daerah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran minimal sekali dalam tiga bulan dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan Kas;
- i. bertanggungjawab atas fisik dan keuangan maupun efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Daerah yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan unit kerja yang dipimpinnya.

KETIGA : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dalam menjalankan tugasnya wajib berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta bertanggung jawab kepada Gubernur Provinsi Kalimantan Utara melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2019.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Hukum,



DJOKO ISWORO, S.H.,M.H
NIP. 196209151988031002

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 2 Januari 2019

GOVERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara;
4. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Utara;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tarakan;
6. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Direktur Bank Kaltimara Cabang Tanjung Selor;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 138.44/K.10/2019
TENTANG
PENCUCUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/KUASA... PENGGUNA BARANG DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
UTARA TAHUN ANGGARAN 2019.

DAFTAR NAMA PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG

No	Nama/NIP/Pangkat/Golongan Ruang	Jabatan	Jabatan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
1.	Drs. Ishale NIP. 19630120 198703 1 004 Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Biro Umum dan Perengkepan pada Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
2.	Sunardi, S.T, M.T NIP. 1919620906 199303 1 003 Pembina IV/a	Kepala Biro Pembangunan pada Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
3.	Drs. H. Usdiansyah, M.Si NIP. 19601023 198202 1 003 Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Biro Perencanaan pada Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
4.	H. Rohadi, SE, M.AP NIP. 19660628 199203 1 010 Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Biro Kesejahteraan Rakyata pada Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
5.	Drs. H. Abdul Majid S, M.Si NIP. 19600819 198501 1 001 Pembina Utama Muda, IV/e	Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
6.	Iskandar Alwi, S.IP, M.Si NIP. 19731231 199302 1 001 Pembina Tk. I, IV/b	Pjt Kepala Biro Pemerintahan pada Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
7.	Drs. Samuel Tjpa Padan NIP. 19650214 200112 1 002 Pembina Tk. I, IV/b	Kepala Biro Perencanaan Negara pada Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

8.	Djoko Isworo, SH, MH NIP. 19620915 198803 1 002 Pembina Utama Muda IV/c	Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang
9.	Muhammad Mursid, SE NIP. 19750713 200003 1 005 Pembina, TK I IV/b	Kepala Biro Humas dan Protokol pada Sekretariat Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang
10	Syaensuddin, S.Pd, MPd, MH NIP. 19650518 199002 1 003 Pembina IV/a	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang
11.	Robby Yundi Hartana, S.Sos, MT NIP. 19671125 198803 1 010 Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang
12.	Hasnah Mutaqin, SH, M.HP NIP. 19760806 200112 1 005 Pembina IV/a	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang
13	Dr. Andarias Baso, M.Kes NIP. 19630111 199707 1 001 Pembina IV/a	Sekretaris Dinas Kesehatan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang
14.	Burhanuddin, S.Sos, M.Si NIP.19660905 199002 1 001 Pembina IV/a	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang
15.	H. Firmansyah, SE NIP.19660708 199203 1 013 Pembina TK IV/b	Sekretaris Pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang
16.	Sri Atika, ST, M.Si NIP. 19741120 200013 2 004 Pembina IV/a	Sekretaris pada Dinas Kelautan dan Perikanan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang
17.	Baharuddin, SE NIP. 19640714 198601 1 001 Pembina IV/a	Sekretaris pada Dinas Perhubungan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang
18.	DR. TT. Iman Suranenggala, S.Hut M.Sc NIP. 19711224 200212 1 004, Pembina IV/a	Kepala Bidang Laut dan AGDP pada Dinas Perhubungan	Kuasa Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Barang

19	Ir. Aswandi, MT NIP. 19650809 199403 1 005 Pembina TK I IV/b	Kepala Bidang Darat pada Dinas Perhubungan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
20	Andi Nasuha, ST, MM NIP. 19671030 200012 1 002 Pembina IV/a	Kepala Bidang Perhubungan Udara dan Perkeretaapian pada Dinas Perhubungan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
21	Hamdani, SIP, M.Si NIP. 19670831 198902 1 002 Pembina Tk.I, IV/b	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
22	Meiyanto, S.Hut, MP NIP. 19690405 199903 1 005 Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris pada Dinas Kehutanan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
23	Ir. Bastang, M.AP NIP. 19660922 200112 1 001 Pembina, IV/a	Kepala UPT KPH Mumpukan pada Dinas Kehutanan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
24	R. Diro Pagling, SH, M.Si NIP. 19670815 199203 1 011 Pembina Tk. I, IV/b	Kepala UPT KPH Tarakan pada Dinas Kehutanan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
25	Impung Liam, S.Hut, M.Si NIP. 19650307 200112 1 007 Pembina, IV/a	Kepala UPT KPH Tana Tidung pada Dinas Kehutanan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
26	Syafaruddin, S.Hut NIP. 19750307 200112 1 007 Pembina, IV/a	Kepala UPT KPH Malinau pada Dinas Kehutanan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
27	Wahyu Astude, S.Hut, M.AP NIP. 19730119 199803 2 007 Pembina IV/a	Kepala UPT KPH Bulungan pada Dinas Kehutanan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
28	M.Fadli Patburrahman, S.STP, M.Si NIP.19810125 199912 1 001 Pembina IV/a	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
29	Tri Wahyu Wibowo, ST NIP.196911122002121003 Penata TK I, III/a	Kepala Bidang Substansi Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

30.	Safullah Djamel, ST NIP. 1970125 200112 1 001 Pembina IV/a	Pt Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
31.	Sudjadi, ST, MT NIP. 19700622 199803 1 005 Pembina TK I IV/b	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
32.	Safullah Djamel, ST NIP. 19720125 200112 1 001 Pembina IV/a	Kepala Bidang Tata RuangPerumahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
33.	Muhammad Roswan, ST, MT NIP. 19680801 200012 1 001 Pembina TK I IV/b	Kepala Bidang Perumahan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
34.	Deni Yudianto, ST 19820129 200604 1 007 Penata TK I III/d	Kepala Bidang Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
35.	Syaiful Afrani, S.Sos, M.Si NIP. 19680717 198701 1 001 Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
36.	Sugiatyiah, SE NIP. 19651114 198701 1 001 Pembina, IV/a	Kepala UPT BPPRD Wilayah Kabupaten Bulungan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
37.	Uman, SH NIP. 19680501 199203 1 013 Pembina, IV/a	Kepala UPT BPPRD Wilayah Kota Tarakan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
38.	Drs. H. Suryani H.I NIP. 19620415 198703 1 023 Penata TK I III/d	Kepala UPT BPPRD Wilayah Kabupaten Mahau	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
39.	Elyanto, SE NIP. 19731019 200012 1 028 Penata Tk. I, III/d	Kepala UPT BPPRD Wilayah Kabupaten Nunukan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

40.	Djohan Dasi NIP. 19660419 198909 1 001 Pembina Tk. I, III/d	Kepala UPT EPPKD Wilayah Kabupaten Tana Tidung	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
41.	Sumaji, S.Sos, M.Hum NIP. 19700416 199803 1 011 Pembina Tk I IV/b	Sekretaris Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
42.	Imransyah, SE NIP. 19700613 199303 1 005 Pembina Tk I IV/b	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
43.	Beharuddin L, SE, M.S.P NIP. 19690613 199903 1 010 Pembina IV/a	Kepala UPTD Pelabuhan Tengkyu II Terakem	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
44.	Drs. Priyono Pacesila Apt, Sp. FRS NIP. 19650601 199303 1 015 Pembina Tk. I, IV/b	Wakil Direktur Umum & Keuangan RSUD Terakem	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
45.	Ir. Nurhamdi NIP. 19670806 199403 1 008 Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris pada Dinas Lingkungan Hidup Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
46.	Mohdardi, S.Pt, MM NIP. 19700326 199803 1 009 Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Lingkungan terpadu satu Pintu	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
47.	Dedy Irawan, SE NIP. 19800915 200604 1 014 Pembina IV/a	Sekretaris Inspektorat	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
48.	Drs.Chairun Anwar Almatmuri, MM NIP. 19650521 199403 1 012 Pembina Utama Muda IV/c	Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
49.	Fahrur Raji, SE, S.Pd. NIP. 19680518 198909 1 002 Pembina IV/a	Sekretaris Dinas Pariwisata	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

50.	Bernus, S.Hut NIP. 19720206 199302 1 001 Pembina, IV/a	Plt. Sekreteris /Kabid Pengkajian Perencanaan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
51.	Hj. Rahmatiah, SE NIP.19671102 199703 2 004 Pembina IV/a	Kepala Bidang Industri Dinas Perindustrian, Perdagangan koperasi dan UKM	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
52.	Kasraningsyah, S.IP, M.AP NIP. 19660302 198903 1 014 Pembina Tk. I, IV/b	Sekretaris pada Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
53.	Mur Ansar, SE, MM NIP. 19751202 200012 1 002 Pembina IV/a	Sekretaris Dinas Energi dan Sumber daya Mineral	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
54.	Drs. Teguh Henti S, M.Pd NIP. 19650227 199301 1 006 Pembina TK I IV/ b	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
55	Dr. Nurbaya, S.St, M.P NIP.19701010 200312 2 006 Pembina IV/a	Kepala Cabang Dinas Wilayah Nunukan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
56	Akhmad Yani S.Pd NIP. 19640614 198903 1 013 Pembina IV/a	Kepala Cabang Dinas Wilayah Tarakan	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
57	Dre. Viansito NIP. 19680630 199802 1 002 Pembina IV/a	Kepala Cabang Dinas Wilayah Mahau – KOT	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
58	Mustari, M. Pd NIP. 19700115 199702 1 006 Pembina IV/a	Kepala UPTD TKP	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
59	Eunike Suppa, ST NIP. 19790622 200312 2 006 Penela Muda III/a	Kepala UPTD Taman Budaya	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

60	H.Mohd. Herdiansyah SH, M.Si NIP.19671001 198902 1 002 Pembina IV/a	Kepala Bidang Anggaran dan Bina Administrasi Badan Pengelola keuangan dan aset Daerah	Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang
----	---	--	---

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Salinan sesuai dengan aslinya.

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Kepala Biro Hukum,



DJOKO ISWORO, S.H.,M.H

NIP. 196209151988031002